

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

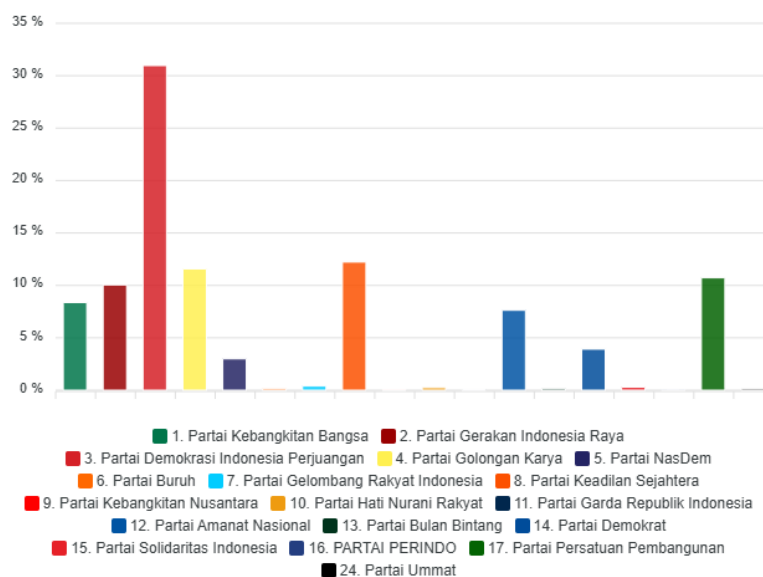
### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen (Sandra Amalia et al., 2021). Sejak 2009, Indonesia mengadopsi sistem perwakilan proporsional terbuka, yang memberikan pemilih kebebasan untuk memilih kandidat individu. Dalam sistem ini, kekuatan individu seperti pengenalan nama, jejaring sosial, sumber daya finansial, dan posisi dalam partai menjadi penentu utama keberhasilan. Konsep mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif merupakan negara dalam memberikan *affirmative action* bagi perempuan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah kandidat perempuan, namun tidak dengan keterpilihannya (Tias et al., 2023). Kandidat perempuan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan akibat struktural yang membatasi akses mereka terhadap modal politik, sosial, dan finansial (Andari et al., 2024). Politik di Indonesia masih didominasi oleh nilai-nilai dan praktik yang maskulin, yang mengutamakan kekuatan modal, jaringan informal antar elite, serta gaya komunikasi yang agresif dan kompetitif. Dalam sistem seperti ini, perempuan cenderung berada pada posisi yang kurang diuntungkan karena dihadapkan pada ekspektasi ganda, di satu sisi dituntut untuk mampu bersaing dalam ruang publik yang keras, di sisi lain tetap diikat oleh norma sosial yang membatasi ruang gerak mereka di ranah domestik. Situasi ini mencerminkan bagaimana hambatan bukan

hanya berasal dari sistem pemilu yang terbuka, tetapi juga dari cara politik dikonstruksikan sebagai arena kekuasaan laki-laki.

Salah satu fenomena menarik yang muncul dalam Pemilu 2024 adalah tidak adanya satupun keterwakilan dari caleg perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dapil V Majalengka yang berhasil meraih kursi legislatif, meskipun PDI-P sendiri menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi di Dapil V Kabupaten Majalengka. Berikut data-data perolehan suara pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024:

**Gambar 1. 1**  
**Perolehan Suara Partai Politik di Dapil V Kabupaten Majalengka pada Pemilu 2024**



**Sumber:** KPU Kabupaten Majalengka

Berdasarkan diagram yang ditampilkan, PDI-P jelas mendominasi perolehan suara di Dapil V Kabupaten Majalengka dengan persentase yang signifikan, mencapai lebih dari 30% dari total suara. Persentase ini jauh melampaui

partai-partai lain, di mana partai dengan perolehan suara terbesar berikutnya hanya berada di kisaran 10-15%. PDI-P seringkali memanfaatkan kader-kader lokal yang memiliki kedekatan emosional dengan Masyarakat. Kedekatan ini memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan PDI-P dalam memenangkan suara, karena merasa lebih dekat dan memiliki hubungan personal dengan calon legislatif dari partai ini. Bahkan selama 3 kali pemilu berturut-turut, PDI-P menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak dari partai-partai lainnya, berikut bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 1**  
**Perolehan Suara & Kursi PDI-P di Dapil V Majelengka pada Pemilu**  
**Tahun 2014, 2019, dan 2024**

<b>Tahun Pemilu</b>	<b>Perolehan Suara PDI-P</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Jumlah Kursi yang diraih</b>
2014	52.376	1	4
2019	39.315	1	3
2024	47.628	1	4

**Sumber:** Diolah dari data arsip KPU Kabupaten Majalengka

Tabel di atas memperlihatkan hasil perolehan suara pada pemilu tahun 2014, Tahun 2019, dan tahun 2024 di Dapil V. Dalam tiga pemilu terakhir, PDI-P secara konsisten menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak. Posisi dominan ini mencerminkan kekuatan basis massa PDI-P di wilayah tersebut, yang dikenal sebagai salah satu kantong suara tradisional partai berlambang banteng. Keberhasilan PDI-P mempertahankan dominasinya selama beberapa periode menunjukkan keberlanjutan strategi politik partai yang efektif, termasuk dalam menjangkau pemilih akar rumput. Namun, dominasi suara ini tidak serta-merta

diiringi oleh keberhasilan caleg Perempuan PDI-P untuk duduk di kursi legislatif. Pada Pemilu 2024, meski PDI-P meraih 4 kursi, tidak ada satupun yang diisi oleh Perempuan. Hal serupa dengan kondisi Pemilu 2019, di mana caleg Perempuan PDI-P juga gagal memperoleh kursi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan caleg perempuan, khususnya dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem ini, keberhasilan caleg ditentukan oleh jumlah suara individu yang diperoleh, termasuk juga posisi dalam daftar calon. Beberapa penelitian mencatat bahwa caleg perempuan kerap menghadapi hambatan dalam hal akses terhadap sumber daya politik dan jaringan sosial yang kuat, yang masih lebih banyak dikuasai oleh aktor-aktor laki-laki (Jankowski & Rehmert, 2024; Tias et al., 2023; White et al., 2024). Berikut tabel jumlah perolehan suara Caleg PDI-P pada tiga periode terakhir:

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Perolehan Suara Caleg PDI-P di Dapil V Kabupaten Majalengka**  
**pada Pemilu Tahun 2014**

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
	4. PDI Perjuangan	16.164
1.	Ir. H. Dadang Ahmad Satari	10.584
2.	Sep Yayat, S.Sos	2.964
3.	<b>Imas Masriah</b>	1.526
4.	Johanis Hanny Tamaka	2.388
5.	Drs. H. Edi Anas Djunaedi, M.M	9.931
6.	<b>Lilis Tresnawati</b>	848
7.	Agus Thohir, S.Pd.I.	2.014
8.	Casmadi	537
9.	<b>Lilis Lisnawati, A. Md.</b>	2.026
10.	Donny Rambitan	3.394
	<b>Jumlah</b>	52.376

**Sumber:** KPU Kabupaten Majalengka

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Perolehan Suara Caleg PDI-P di Dapil V Kabupaten Majalengka**  
**pada Pemilu Tahun 2019**

No. Urut	Partai Politik/Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
	4. PDI Perjuangan	5.859
1.	H. Yahya Mulyadi, SE.Sy.	2.920
2.	Indra Sudrajat	1.998
3.	<b>Rina Ernangingsih</b>	2.442
4.	Iman Nurmansyah, S.Pd.	9.324
5.	Ading Madudin, S.Sos., MM.	2.950
6.	<b>Sri Sugriati</b>	1.065
7.	Atik Supratman	449
8.	Randy Adries Permana	8.888
9.	<b>Fikri Primas Tiana Satari</b>	53
10.	Aan Supriatman	3.367
	<b>Jumlah</b>	39.315

Sumber: KPU Kabupaten Majalengka

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah Perolehan Suara Caleg PDI-P di Dapil V Kabupaten Majalengka**  
**pada Pemilu Tahun 2024**

No. Urut	Partai Politik/ Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
	3. PDI Perjuangan	4.572
1.	Iman Nurmansyah, S.Pd.	11.650
2.	Randy Adries Fermana, S.Sos.	9.837
3.	<b>Rina Ernarningsih</b>	2.193
4.	H. Eman Faturachman, S.H., M.Si.	9.360
5.	<b>Sri Sugriati</b>	467
6.	Aan Supriatman	790
7.	<b>Sucintia</b>	1.420
8.	<b>Sri Wahyuni</b>	2.221
9.	H. Ahim Nurahim	49
10.	H. Agustinus Subagja	5.069
	<b>Jumlah</b>	47.628

Sumber: KPU Kabupaten Majalengka

Dari total sepuluh caleg PDI-P yang bersaing di Dapil V Kabupaten Majalengka pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024, tidak ada satupun caleg Perempuan yang berhasil memperoleh kursi. Dalam tiga periode pemilu, performa caleg Perempuan cenderung konsisten berada di bawah rata-rata perolehan suara caleg laki-laki, bahkan dengan kecenderungan penurunan pada beberapa pileg. Kegagalan caleg perempuan PDIP bukan hanya sekadar soal jumlah suara, tetapi juga menyingkap realitas kompleks tentang bagaimana perempuan dihadapkan pada berbagai hambatan dalam perjuangan menuju keterwakilan politik. Hambatan tersebut muncul dalam berbagai dimensi, baik struktural, sosial-budaya, maupun kelembagaan partai.

Partai politik sebagai *gatekeepers* (penjaga gawang) memiliki peran krusial dalam rekrutmen dan seleksi calon legislatif, sehingga posisi mereka sangat strategis dalam menentukan siapa yang dapat mengakses ruang kekuasaan. Wäckerle (2022) berpendapat seringkali partai politik terlihat mendukung kesetaraan gender dengan mencalonkan Perempuan, tetapi dalam kenyataannya, posisi yang diberikan kepada Perempuan seringkali tidak memiliki prospek kemenangan atau keberhasilan yang sama seperti yang diberikan kepada laki-laki, atau dengan kata lain, laki-laki cenderung tetap mendapatkan peran dalam situasi yang lebih menjanjikan atau tempat yang lebih aman (Wäckerle, 2022). Dalam praktik sehari-hari, institusi ini tetap di dominasi oleh laki-laki dan diwarnai aturan informal yang meminggirkan perempuan (Kahpi, 2024).

Sucintia (Caleg PDIP di Dapil V) misalnya, kader dadakan yang diusung tanpa persiapan yang memadai dan tanpa pengalaman politik yang cukup (sumber

wawancara dengan Rina Ernaningsih (Caleg PDIP) 2024). Dengan modal politik yang lemah dan waktu persiapan yang terbatas, Sucintia harus bersaing dengan caleg laki-laki yang telah lama dikenal masyarakat dan memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya kampanye.

Hal serupa dirasakan Rina Ernaningsih. Ia merupakan kader militan PDI-P yang telah bersama partai ini hampir 11 tahun. Selama itu, ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan Perempuan, seperti mengadakan pelatihan masak dan *make-up* untuk membantu Perempuan di komunitasnya mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Namun, saat dirinya mencalonkan diri sebagai calon legislatif, ia menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu anggapan negatif dari sebagian masyarakat. Beberapa orang bahkan menggambarkan mendukung Rina seperti "mendorong mobil rusak," yang menggambarkan ketidakmampuan ekonomi karena tidak memiliki dana yang cukup untuk mendukung pencalonan tersebut (sumber wawancara dengan Rina Ernaningsih, 2024).

Pada dasarnya, persoalan seperti keterbatasan dana dan tekanan sosial dapat dikategorikan sebagai tantangan pribadi. Namun, dalam konteks politik elektoral yang penuh persaingan dan minim dukungan kelembagaan terhadap caleg perempuan, tantangan-tantangan ini berkembang menjadi hambatan struktural. Pandangan pragmatis masyarakat yang memprioritaskan kekuatan finansial sebagai penentu keberhasilan politik tidak hanya meminggirkan caleg yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga memperlihatkan adanya bias sistemik terhadap perempuan. Ketidakpercayaan terhadap perempuan dalam

mengelola sumber daya politik dan ekonomi menciptakan hambatan sosial yang mengakar, yang semakin menyulitkan caleg perempuan untuk dipandang setara dengan kandidat laki-laki.

Meskipun Perempuan mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti Pendidikan atau ekonomi, kemajuan tersebut seringkali tidak mengubah posisi mereka dalam Masyarakat secara keseluruhan, mereka seringkali tetap dianggap lebih rendah atau inferior dalam struktur sosial patriarki (Sanbonmatsu, 2017; Standfield, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa Perempuan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan menyeluruh, membuat mereka sulit untuk bersaing (Andari et al., 2024; Fellegi et al., 2023; Hapsari & Wardani, 2019; Tias et al., 2023; Sanders, 2022).

Dalam penelitian Fellegi (2023), perempuan dalam berbagai negara seperti China, Afghanistan, Kosovo, dsb menghadapi stereotip gender yang merusak kredibilitas mereka di ruang politik. Di sisi lain, proses nominasi dan rekrutmen partai cenderung menguntungkan kandidat laki-laki atau perempuan dengan jaringan kuat, sementara perempuan umumnya tidak memiliki akses yang sama. Bias pemilih serta citra negatif dari media turut memperkuat hambatan yang dihadapi (Fellegi et al., 2023). Penelitian Pradita dkk (2024) juga menemukan bahwa hambatan terhadap keterwakilan caleg perempuan muncul dalam bentuk kesenjangan akses terhadap modal sosial, bias terhadap kandidat laki-laki, serta ekspektasi sosial yang membatasi peran perempuan dalam dunia publik (Andari et al., 2024).



Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Wardani (2019) menunjukkan sejumlah hambatan yang dihadapi oleh kandidat Perempuan dalam proses pencalonan legislatif, seperti adanya dominasi elit partai dalam rekrutmen yang lebih mengutamakan kedekatan pribadi daripada system formal, regulasi seleksi yang tidak berpihak juga tambah memperburuk situasi, karena tidak mempertimbangkan hambatan structural yang dihadapi Perempuan. kemudian penentuan nomor urut yang lebih menguntungkan laki-laki, marginalisasi, serta keraguan dan kurangnya pengalaman kandidat (Hapsari & Wardani, 2019). Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Tias dkk (2023), dalam penelitiannya menemukan adanya budaya patriarki dan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif hanya dijadikan sebagai formalitas belaka (Tias et al., 2023). Sementara itu, serupa dengan penelitian (Sanders, 2022) seringkali tantangan praktik informal dalam lembaga seringkali menghambat representasi substantif perempuan.

Dari beberapa studi di atas, terlihat bahwa persoalan keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan individu calon perempuan itu sendiri, tetapi juga dengan struktur dan aturan main politik yang lebih luas. Perempuan tidak hanya berhadapan dengan tantangan personal seperti kurangnya sumber daya, pengalaman, atau kepercayaan diri, tetapi juga terjebak dalam sistem politik yang telah lama didominasi oleh laki-laki, di mana norma, praktik, dan budaya patriarkal masih sangat kuat. Struktur institusional seperti partai politik sering kali tidak menyediakan ruang yang setara bagi perempuan untuk berkompetisi (Clavero & Galligan, 2020; O'Connor, 2020), misalnya melalui

proses pencalonan yang tidak transparan, kuota yang tidak dijalankan secara substansial, serta lemahnya komitmen partai dalam mendukung kandidat perempuan. Selain itu, aturan main yang tidak sensitif gender, seperti biaya politik yang tinggi, jaringan patronase, serta politik transaksional, mempersempit akses perempuan ke arena politik (Andari et al., 2024; Pratiwi et al., 2024; Ramadhani & Rahmawati, 2020). Dengan demikian, keterwakilan perempuan tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan individu, tetapi merupakan refleksi dari persoalan struktural dan institusional yang membutuhkan intervensi yang lebih sistemik dan berperspektif keadilan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh calon legislatif (caleg) perempuan dalam mencapai keterwakilan politik yang setara, dengan menelaah bagaimana struktur formal serta norma informal dalam kelembagaan politik berinteraksi dan memproduksi ketidakadilan gender. Melalui pendekatan feminisme institusional dan teori ketidakadilan gender Mansour Fakih, penelitian ini berupaya mengungkap bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam proses politik, serta bagaimana kondisi-kondisi kelembagaan tersebut menjadi hambatan sistemik bagi keterlibatan dan keberhasilan caleg perempuan dalam kontestasi elektoral.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalahnya, yaitu “bagaimana hambatan yang dihadapi caleg perempuan PDI-P di Dapil V Kabupaten Majalengka pada Pemilu 2024?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana hambatan yang dihadapi calon legislatif (caleg) perempuan dari PDI-P di Dapil V Kabupaten Majalengka pada Pemilu 2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi internal bagi partai dalam melihat kembali strategi pencalonan dan dukungan terhadap kader perempuan. Hasil penelitian dapat memberikan masukan mengenai hambatan-hambatan struktural dan kultural yang perlu diatasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dengan memahami peran regulasi, khususnya kuota perempuan dan sistem pemilu proporsional terbuka, dalam keberhasilan atau kegagalan keterwakilan perempuan di tingkat lokal. Dengan mengidentifikasi hambatan dari regulasi dan implementasinya, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan caleg perempuan.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hambatan keterwakilan politik perempuan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut tentang peran gender dalam politik lokal dan keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga berkontribusi pada pembangunan politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.